TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5716-5721
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Concept of Environmental Policy and Its Relationship to Sustainable Development

Bonaraja Purba*[1], Meilani Putri [2], Siti Fatimah[3], Salwa Lailani[4]
bonarajapurba@unimed.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

ABSTRACT
Environmental policy plays an important role in addressing environmental problems while supporting the achievement of sustainable development. This study aims to examine the concept of environmental policy and its relationship with sustainable development, particularly in balancing economic, social, and environmental interests. This study uses a literature review method by analyzing relevant books, journal articles, and other academic sources related to environmental policy and sustainable development. The results indicate that environmental policy serves as an important instrument for managing natural resources, controlling pollution, protecting ecosystems, and encouraging environmentally responsible economic activities. Effective environmental policies can contribute to sustainable development by integrating environmental considerations into development planning and decision-making. The study also shows that the implementation of environmental policies requires cooperation among the government, private sector, communities, and other stakeholders. Therefore, consistency in policy implementation, public participation, and effective environmental management are important factors in supporting sustainable development. This study provides an overview of the relationship between environmental policy and sustainable development and emphasizes the importance of strengthening environmental governance to achieve long-term development goals.

Keywords: environmental governance; environmental management; environmental policy; natural resources; sustainable development.

PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang aktivitas pembangunan, tetapi pemanfaatan yang tidak terkendali dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, serta berkurangnya ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lingkungan yang dapat mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan lingkungan agar tetap memperhatikan keberlanjutan. Kebijakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Permasalahan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan proses pembangunan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak disertai dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian menjadi penting karena menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan lingkungan menjadi salah satu instrumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Berbagai penelitian telah membahas kebijakan lingkungan dari beberapa perspektif, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pembangunan berkelanjutan, serta penggunaan instrumen kebijakan. Instrumen tersebut dapat berupa regulasi, instrumen ekonomi, insentif dan disinsentif, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta mekanisme pengawasan dan pengendalian. Kajian mengenai pembangunan berkelanjutan juga menunjukkan pentingnya integrasi aspek lingkungan ke dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, pembahasan mengenai kebijakan lingkungan masih sering dilakukan secara terpisah antara aspek konsep, prinsip, instrumen, dan penerapannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat kebijakan lingkungan secara lebih terintegrasi. Keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan lingkungan apabila tidak disertai dengan implementasi, pengawasan, penegakan aturan, koordinasi antarlembaga, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara konsep kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan perlu dikaji secara menyeluruh agar dapat memberikan gambaran mengenai peran kebijakan lingkungan dalam mengarahkan proses pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan lingkungan serta keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan. Penelitian ini juga membahas prinsip-prinsip dan instrumen kebijakan lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Kebaruan kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pembahasan mengenai konsep, prinsip, instrumen, implementasi, dan tantangan kebijakan lingkungan dalam kaitannya dengan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji konsep kebijakan lingkungan serta keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan berdasarkan berbagai sumber akademik dan dokumen yang relevan. Kajian difokuskan pada konsep kebijakan lingkungan, prinsip-prinsip kebijakan lingkungan, instrumen kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, serta hubungan kebijakan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan terhadap buku, artikel jurnal, dokumen akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh informasi mengenai konsep, prinsip, instrumen, serta penerapan kebijakan lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Setiap sumber yang relevan dibaca, diidentifikasi, dan dicatat informasi yang berkaitan dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema pembahasan, membandingkan konsep dan temuan dari berbagai sumber, kemudian melakukan sintesis untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis dilakukan secara naratif dengan menghubungkan hasil kajian dari berbagai sumber. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendukung tercapainya pembangunan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Tujuan Kebijakan Lingkungan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan manusia agar pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Kebijakan lingkungan diperlukan karena kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak disertai dengan pengelolaan yang tepat.

Kebijakan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan. Melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan dapat diidentifikasi dan diminimalkan sejak awal. Dengan demikian, kebijakan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip dalam Kebijakan Lingkungan

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, yaitu prinsip pencegahan, prinsip pencemar membayar, prinsip kehati-hatian, dan prinsip keberlanjutan.

Prinsip pencegahan menekankan bahwa kerusakan lingkungan perlu dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Prinsip pencemar membayar menempatkan tanggung jawab biaya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada pihak yang menimbulkannya. Sementara itu, prinsip kehati-hatian menekankan perlunya tindakan untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan meskipun terdapat ketidakpastian mengenai dampak yang mungkin terjadi. Prinsip keberlanjutan mengarahkan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pencegahan dan pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang.

Instrumen Kebijakan Lingkungan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat dilaksanakan melalui berbagai instrumen. Instrumen tersebut antara lain regulasi atau peraturan, instrumen ekonomi, insentif dan disinsentif, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pengawasan dan pengendalian.

Regulasi digunakan untuk menetapkan batasan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Instrumen ekonomi dapat digunakan untuk memberikan dorongan agar pelaku kegiatan mempertimbangkan biaya lingkungan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, insentif dan disinsentif dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

AMDAL memiliki peran dalam mengidentifikasi dan memperkirakan potensi dampak lingkungan dari suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, instrumen kebijakan lingkungan dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan sekaligus pengendalian terhadap dampak kegiatan pembangunan.

Keterkaitan Kebijakan Lingkungan dengan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan karena keduanya berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Pembangunan membutuhkan sumber daya alam sebagai input kegiatan ekonomi, tetapi pemanfaatan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, kebijakan lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya kebijakan yang tepat, kegiatan pembangunan dapat diarahkan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Efektivitas kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Implementasi kebijakan membutuhkan pengawasan, penegakan aturan, koordinasi antarlembaga, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan dapat membantu meningkatkan kepatuhan serta mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Dengan demikian, implementasi kebijakan lingkungan perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Lingkungan

Dalam penerapannya, kebijakan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah lemahnya pengawasan, penegakan aturan yang belum optimal, koordinasi antarlembaga yang belum efektif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat.

Selain itu, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, kebijakan lingkungan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.

Sintesis Hasil Kajian

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang saling mendukung. Kebijakan lingkungan menyediakan prinsip dan instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka agar proses pembangunan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak cukup hanya diukur dari keberadaan regulasi. Efektivitasnya juga dipengaruhi oleh implementasi, pengawasan,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

penegakan hukum, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Integrasi berbagai aspek tersebut menjadi penting agar kebijakan lingkungan dapat memberikan kontribusi terha dap pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan lingkungan merupakan instrumen penting dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan lingkungan serta sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kebijakan lingkungan tidak hanya berfungsi untuk menangani kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga berperan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan melalui perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta penggunaan berbagai instrumen kebijakan.

Kebijakan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Prinsip pencegahan, pencemar membayar, kehati-hatian, dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung tujuan tersebut. Efektivitas kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh implementasi, pengawasan, penegakan aturan, koordinasi antarlembaga, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan perlu diintegrasikan ke dalam proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder melalui studi literatur, sehingga belum menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara langsung di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan penelitian empiris pada wilayah atau sektor tertentu agar dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi kebijakan lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.

Purnaweni, H. (2014). Kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Lingkungan, 12(1), 53–65. https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65

Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a regional development plan in Indonesia. Sustainability, 16(23), 10235. https://doi.org/10.3390/su162310235

Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. Sustainability, 15(8), 6560. https://doi.org/10.3390/su15086560

Rusadi, S., & Adni, D. F. (2025). Evolusi studi global tentang keberlanjutan ekologis: Sebuah kebijakan adaptif untuk Indonesia. Jurnal Ilmu Lingkungan, 23(2), 305–315. https://doi.org/10.14710/jil.23.2.305-315

Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., MacGregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance auditing to assess the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. Sustainability, 14(19), 12772.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

https://doi.org/10.3390/su141912772

Suparmoko. (2014). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. BPFE.

Thomas, V., & Chindarkar, N. (2019). Economic evaluation of sustainable development. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6389-4

United Nations Environment Programme. (2015). Policy coherence of the sustainable development goals: A natural resource perspective. United Nations Environment Programme.

World Bank. (2023). Indonesia country climate and development report. World Bank Group.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135